



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

DINAS PERIKANAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERIKANAN

Kompleks Tempat Pemasaran Ikan (TPI), Desa Wewangriu, Malili Kec. Malili
Telepon/Fax. (0474) 321 510 Kode Pos 92981
e.mail : dinaskelautanluwutimur@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
NOMOR : 07 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025 DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025
DINAS PERIKANAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 dan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

b. bahwa untuk maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara nomor 4270);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021 Nomor 11).
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;

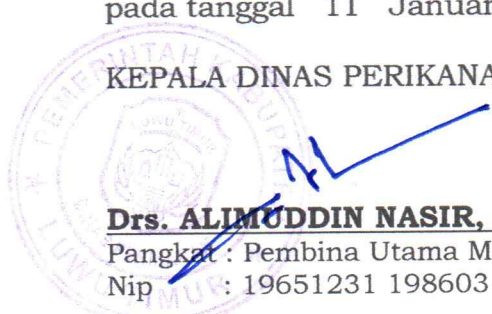
M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025 DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR.

- PERTAMA : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2025 Dinas Perikanan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 11 Januari 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN


Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19651231 198603 1 134

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur

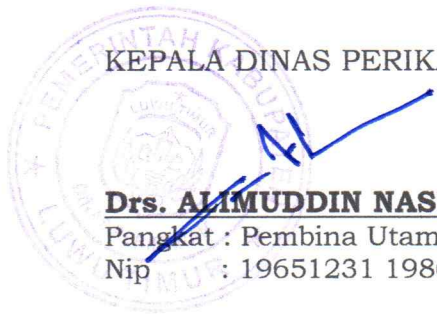
Nomor : 07 Tahun 2024
Tanggal : 11 Januari 2024

**PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas
Ketua : Sekertaris Dinas
Sekretaris : Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Anggota :

1. Kepala Bidang Perikanan Tangkap
2. Kepala Bidang Perikanan Budidaya
3. Kepala Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian
5. Fungsional Analis Akuakultur
6. Fungsional Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap
7. Fungsional Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
8. Fungsional Pengelolaan Dampak Lingkungan
9. Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan
10. Kepala UPTD BBI

KEPALA DINAS PERIKANAN


Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19651231 198603 1 134

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur

Nomor : 07 Tahun 2024

Tanggal : 11 Januari 2024

**RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

1. Penanggungjawab

- Bertanggung jawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Perikanan.
- Memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam menyusun Renja Dinas Perikanan.
- Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

2. Ketua

- Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Renja Dinas Perikanan.
- Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam menyusun Renja Dinas Perikanan.
- Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab Renja Dinas Perikanan.

3. Anggota

- Mereview hasil pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) tahun lalu
- Melaksanakan analisis kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Perikanan
- Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyeleggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah Dinas Perikanan.
- Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD.
- Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan.
- Merumuskan kegiatan prioritas.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERIKANAN

Kompleks Tempat Pemasaran Ikan (TPI), Desa Wewangriu, Malili Kec. Malili
Telepon/Fax. (0474) 321 510 Kode Pos 92981
e.mail : dinaskelautanluwutimur@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
NOMOR : 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2025

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2025, perlu disusun rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran tahun 2025.

b. bahwa Rencana Kerja Perubahan sebagaimana maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara nomor 4270);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021 Nomor 11).
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR.

PERTAMA : Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Perikanan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 1 April 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN

Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19651231 198603 1 134

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga "Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2025" dapat diselesaikan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Tahun Keempat dari RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Renja ini disusun sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan tahun 2025, serta memberi kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Luwu Timur pada khususnya dan Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya terutama. Segala dukungan dari semua pihak sangat diharapkan, baik dari *stakeholder* dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di daerah.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Renja ini dapat terselesaikan, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga Renja ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Luwu Timur.

Malili, April 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN

Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip 19651231 198603 1 134

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Diagram	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	29
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	37
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	37
3.3 Program dan Kegiatan	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	49
BAB V PENUTUP	50
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD	2
----------	---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	(T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah	2
Tabel 3.2	Pengukuran Perjanjian Kerja Eselon II	16
Tabel 3.3	Perkembangan Capaian Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan Tahun 2023	18
Tabel 3.4	Capaian Produksi Perikanan Tahun 2023	19
Tabel 3.5	Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan Tahun 2023	22
Tabel 3.6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan Tahun 2023	23
Tabel 3.7	Capaian Nilai Lakip Tahun 2023	24
Tabel 3.8	Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023	26
Tabel 3.9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan Tahun 2023	26
Tabel 3.10	(T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
Tabel 3.11	Isu Strategis yang Melingkupi Pelaksanaan Pelayanan di Sektor Perikanan	29
Tabel 3.12	(T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	35

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1	Perbandingan Capaian Kinerja Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan Tahun 2020-2023	2
Diagram 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Produksi Perikanan Tahun 2020-2023	20
Diagram 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Lakip Tahun 2020-2023	25

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 (Tabel 3) Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
- Lampiran 2 (Tabel 5) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025
- Lampiran 3 (Tabel 6) Alokasi Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Muatan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yang berisi arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), program lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, wajib dijabarkan oleh setiap OPD dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 sebagai dokumen acuan dalam perencanaan setiap tahunnya.

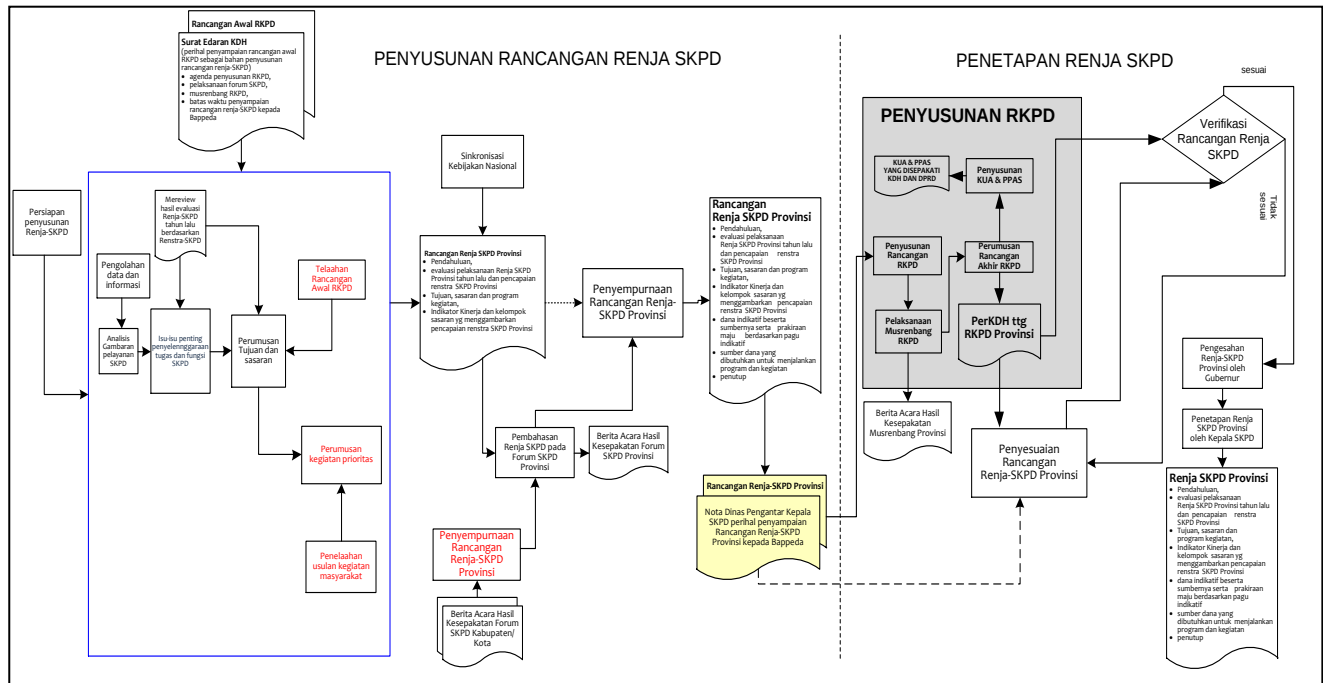
Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja harus mengacu pada Renstra OPD dan disusun secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan agar dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang partisipatif dan berkesinambungan.

Menyediakan suatu dokumen perencanaan pembangunan untuk 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif memuat kerangka makro sektor Perikanan Kabupaten Luwu Timur dan pilihan program maupun kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) secara berjenjang dan berkesinambungan.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Prioritas pembangunan Dinas Perikanan difokuskan pada pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD tahun 2025. Penyusunan Renja OPD harus

mempertimbangkan RKP Nasional, RKPD Propinsi dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Luwu Timur.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.:



Gambar 1: Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 nomor 3); dan
22. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah :

- ☞ Untuk menjabarkan program dan kegiatan RENSTRA OPD ke dalam program/kegiatan Tahunan;
- ☞ Menyiapkan acuan bagi penyusunan RAPBD, KUA PPAS, dan RKA Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2025;
- ☞ Menyiapkan Kerangka Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan dalam 1 (satu) Tahun; dan
- ☞ Membangun proses perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumberdaya Perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur secara optimal.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Perikanan Tahun 2025 antara lain :

- ☞ Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
- ☞ Terbangunnya konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan;

- ☞ Menyediakan satu tolok ukur yang dapat dijadikan indikator dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Perikanan.
- ☞ Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perikanan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur; dan
- ☞ Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya Perikanan yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun Dokumen Renja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3. 1. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3. 2. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur menetapkan Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2021 – 2026. Secara umum evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun 2023, dilakukan dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja OPD. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Evaluasi atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Daerah dan Renstra yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun sesuai dengan besaran indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi APBD Dinas Perikanan. Pada Tahun 2023 Dinas Perikanan melaksanakan 5 Program, Kegiatan 18 dan 43 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp23.117.207.928,37 atau sebesar 96,73 % dari pagu anggaran sebesar Rp23.899.838.200,00. Terdiri dari Belanja Operasi dengan total anggaran Rp21.660.608.200,00 dan terealisasi Rp20.924.587.301,80 atau 96.60 %, serta Belanja Modal dengan total anggaran Rp2.239.230.000,00 dan terealisasi Rp2.192.620.626,57 atau 97.92 %. Untuk lebih jelasnya kinerja Dinas Perikanan pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.1 (T-C.29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PERIKANAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Program Kinerja (Renstra Tahun 2026 Akhir Periode RENSTRA SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2023		
								Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH YANG BERJALAN SESUAI STANDAR	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 %
25	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 %
			01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
			02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA/SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
			04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA/SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100 %

			07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	50 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	100 %
25	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (persen)	100 Persen		100 Persen	94,26 Persen	94,26 %
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	31 Orang		26 Orang	26 Orang	100 %
			07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	90 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	100 %
25	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 %
			06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan BMD pada SKPD yang disusun	20 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
25	01	2.04		Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan PD	100 Persen		100 Persen	12,60 Persen	12,60 %
			07	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	20 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
25	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	142,12 Persen	142,12 %
			03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	60 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100 %

			11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	35 Orang		7 Orang	15 Orang	214 %
25	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 %
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Jenis		10 Jenis	10 Jenis	100 %
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	20 Unit		102 Unit	102 Unit	100 %
			04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	105 Jenis		20 Jenis	20 Jenis	100 %
			05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang diadakan	20 Jenis		7 Jenis	7 Jenis	100 %
			06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	240 Eksamplar		48 Eksamplar	48 Eksamplar	100 %
			08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu (Makan Minum Tamu)	Jumlah tamu yang difasilitasi	800 Orang		332 Orang	332 Orang	100 %
			09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	1.000 Kali		230 Kali	230 Kali	100 %
25	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 %
			02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100 %
			06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	20 Unit		2 Unit	2 Unit	100 %

25	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen		100 Persen	231,63 Persen	231,63 %
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	10.000 Surat		2.000 Surat	4.738 Surat	236,9 %
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	10 Rekening		10 Rekening	10 Rekening	100 %
			04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang terbayarkan	8 Orang		10 Orang	10 Orang	100 %
25	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 %
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	23 Unit		23 Unit	23 Unit	100 %
			06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 Unit		40 Unit	40 Unit	100 %
			09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit		6 Unit	6 Unit	100 %
25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	10.369 Ton		10,216 Ton	10.373 Ton	101,53 %
25	03	2.01		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 %
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen data dan informasi sumber daya perikanan	20 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100 %

			02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah tambatan perahu yang dibangun/rehap	10 Unit		2 Unit	2 Unit	100 %
			03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana alat tangkap dan alat bantu usaha perikanan ikan yang disediakan	75 Kelompok		60 Kelompok	60 Kelompok	100 %
25	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil	Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan	100 Persen		100 Persen	99,99 Persen	99,99 %
			01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang dilatih teknologi penangkapan ikan	100 Orang		40 Kelompok	40 Kelompok	100 %
			02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pendampingan	60 Kelompok		25 Kelompok	25 Kelompok	100 %
25	03	2.03		Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar	100 Persen		57 Persen	75 Persen	131,57 %
			01	Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI/fasilitas pokok PPI yang dibangun/rehab	5 Unit		1 Unit	1 Unit	100 %
25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	316.365 Ton		315,710 Ton	378.996,7 Ton	120,04 %
25	04	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses iptek dan informasi dan penguatan kelembagaan	100 Persen		100 Persen	99,99 Persen	99,99 %
			01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya yang diberdayakan	100 Kelompok		27 Kelompok	27 Kelompok	100 %

			03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, dan Kemitraan Usaha	Jumlah lahan pembudidaya ikan disertifikatkan	300 Persil		50 Persil	50 Persil	100 %
			04	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan bantuan/APBN/APBD I/ APBD	150 Kelompok		27 Kelompok	27 Kelompok	100 %
25	04	2.04		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan	100 Persen		100 Persen	84,07 Persen	84,07 %
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	Jumlah dokumen data dan informasi pembudidaya ikan	20 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan	Jumlah prasarana di BBI yang dibangun/rehab	10 Unit		1 Unit	1 Unit	100 %
					Jumlah jembatan tambak yang disediakan	15 Unit		3 Unit	3 Unit	100 %
					Jumlah jalan produksi tambak yang dibangun dan ditingkatkan	20 Km		4 Km	4.43 Km	110,75 %
			03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan	Jumlah benih unggul serta sarana pembudidaya ikan yang tersedia	100 Kelompok		96 Kelompok	95 Kelompok	98,95 %
			04	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	Jumlah pembudidaya yang mendapatkan informasi kesehatan ikan dan lingkungan dengan memperhatikan keterwakilan gender	150 Orang		30 Orang	30 Orang	100 %
			05	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidaya Ikan di Darat	Jumlah bibit unggul yang dihasilkan	490.000 Ekor		90.000 Ekor	75.640 Ekor	84,04 %

25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA KP TERHADAP KETENTUAN PERATURAN-PERUNDANGAN YANG BERLAKU	100 Persen		94 Persen	95 Persen	101 %
		2.01		Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Cakupan masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang aktif	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 %
			02	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha perikanan tangkap	120 Kali		24 Kali	24 Kali	100 %
25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PRODUKSI HASIL PENGOLAHAN IKAN	370 Ton		322 Ton	710,57 Ton	220 %
		2.01		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 %
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	20 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
		2.02		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya	83 Persen		83 Persen	85 Persen	102,40 %
			01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	25 kali		6 kali	6 kali	100 %

		2.03		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang	100 Persen		64 Persen	75 Persen	117,18 %
			02	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok/pelaku usaha yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan skala mikro dan kecil	25 Unit		4 Unit	3 Unit	75 %

Hasil Pengukuran capaian kinerja tahun 2023 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas Perikanan dengan Bupati Luwu Timur.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada masing-masing sasaran, diperoleh nilai pencapaian kinerja. Penilaian skala yang ditetapkan sebagai parameter keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

$x \geq 85$	: Sangat Berhasil
$70 \leq x < 85$	: Berhasil
$55 \leq x < 70$	: Cukup Berhasil
$x < 55$	: Kurang berhasil

Pengukuran tersebut menggunakan formulir pengukuran kinerja yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 :
Pengukuran Perjanjian Kerja Eselon II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan (Juta Rupiah)	665.289	658.624	99	Sangat Berhasil
		Produksi Perikanan (Ton)	325.926	389.369,70	119,47	Sangat Berhasil
II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip (Angka)	71	*75,95	106,97	Sangat Berhasil

Secara umum Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja pada 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) sasaran

utama dan 1 (satu) sasaran pendukung yang ditetapkan, rata-rata capaian di atas 100% sehingga dapat dikatakan **Sangat Berhasil**.

Capaian kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN STRATEGIS 1 :

Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja :

- a. *Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan*. Indikator kinerja nilai PDRB sub sektor perikanan merupakan nilai keseluruhan semua barang dan jasa sektor perikanan yang diproduksi dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada 1 (satu) tahun tertentu sebagai tahun dasar.
- b. *Produksi Perikanan*. Indikator kinerja produksi perikanan merupakan seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan baik yang diusahakan oleh perusahaan maupun rumah tangga perikanan.

Indikator 1 : Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan

Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Data BPS Kabupaten Luwu Timur sebesar 658.624 Juta Rupiah atau setara 658.624 Milyar atau 99 % terhadap target 665.289 Juta Rupiah yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, maka mengalami penurunan namun tidak signifikan yaitu sebesar 3.172 Juta Rupiah atau -0,48 %. Hal ini disebabkan adanya penurunan harga salah satu komoditi perikanan yaitu rumput laut sehingga nilai tambah barang dan jasa menjadi berkurang.

Tabel 3.3 :
Perkembangan Capaian Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan Tahun 2023

Sasaran Strategis 1			Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan			
Indikator Kinerja 1			Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan			
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Restra
			Target	Realisasi	% Capaian	
636.794,66	635.189,74	661.796,08	665.289	658.624	99	675.323

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya digambarkan pada diagram berikut ini :

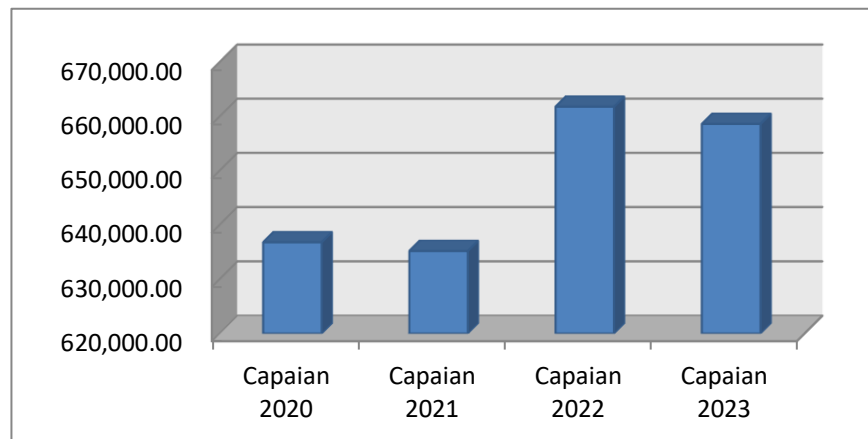


Diagram 3.1 :
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan Tahun 2020-2023

Pada diagram di atas, digambarkan capaian kinerja pada indikator 1 Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dari tahun 2020 sampai tahun 2023 menunjukkan peningkatan meskipun di tahun 2021 mengalami penurunan. Salah satu pemicu sehingga Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan meningkat karena adanya peran serta Pemerintah dengan memberikan bantuan berupa alat tangkap dan sarana alat bantu penangkapan ikan yang disalurkan ke masyarakat nelayan kecil sehingga hasil tangkapan mereka meningkat, serta perubahan pola pikir masyarakat pembudidaya bahwa kegiatan budidaya ikan sangat menjanjikan baik itu budidaya air payau maupun air tawar.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam Renstra berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa

target akhir jangka menengah Renstra sebesar 675.323 Juta Rupiah, sedangkan realisasi Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan sampai tahun 2023 sebesar 658.624 Juta Rupiah, artinya masih ada capaian yang harus dicapai sebesar 16.699 Juta Rupiah.

Indikator Kinerja 2 : Produksi Perikanan

Jumlah produksi perikanan merupakan gabungan produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Jumlah hasil produksi perikanan budidaya merupakan produksi yang dihasilkan selama 1 (satu) tahun yang meliputi perikanan tawar, payau dan laut, sedangkan untuk jumlah produksi perikanan tangkap berasal dari produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum daratan

Tabel 3.4 :
Capaian Produksi Perikanan Tahun 2023

Sasaran Strategis 1			Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan					
Indikator Kinerja 1			Produksi Perikanan					
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Restra	Standar Provinsi	Standar Nasional
			Target	Realisasi	% Capaian			
325.355	325.622	329.212,09	325.926	389.369,70	119,47	326.122	1.316.708	6.660.000

Pencapaian produksi perikanan pada tahun 2023 sebesar 389.369,70 Ton atau 119,47 % terhadap target 325.926 Ton yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, maka mengalami peningkatan sebesar 60.157,61 Ton atau 18,27 %. Hal ini disebabkan adanya peningkatan produksi dari segi budidaya perikanan terutama pada komoditi rumput laut jenis cottoni sehingga terjadi peningkatan produksi.

Perbandingan capaian kinerja produksi perikanan tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya digambarkan pada diagram berikut ini :

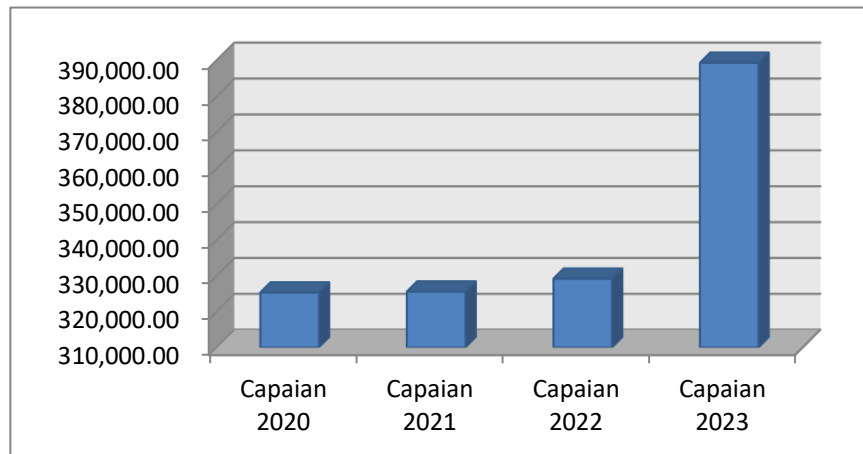


Diagram 3.2 :
Perbandingan Capaian Kinerja Produksi Perikanan Tahun 2020-2023

Pada diagram di atas, digambarkan capaian kinerja pada indikator 2 (dua) Jumlah Produksi Perikanan dari tahun 2020 sampai tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu pemicu sehingga hasil perikanan tangkap dapat meningkat karena adanya peran serta pemerintah dengan memberikan bantuan berupa alat tangkap dan sarana alat bantu penangkapan ikan yang disalurkan ke masyarakat nelayan kecil sehingga hasil tangkapan mereka meningkat, serta perubahan pola pikir masyarakat pembudidaya bahwa kegiatan budidaya ikan akan sangat menjanjikan baik itu budidaya air payau maupun air tawar.

Perbandingan capaian kinerja produksi perikanan tahun 2023 dengan target jangka menengah berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target jangka menengah Renstra sebesar 326.122 Ton, sedangkan realisasi sampai tahun 2023 sebesar 389.369,70 Ton, artinya sudah melebihi dari target yang ada di Renstra.

Sedangkan perbandingan capaian kinerja produksi perikanan tahun 2023 dengan target Provinsi dan Nasional Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2023 Kabupaten Luwu Timur berkontribusi sebesar 25 % terhadap target pencapaian produksi perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk pencapaian target nasional, Kabupaten Luwu Timur berkontribusi sebesar 4,94 %.

Dalam pencapaian sasaran strategis **Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan**, dihadapkan dengan adanya keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, maka dari itu kami mencoba untuk melakukan Analisa Penyebab Peningkatan dan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan yaitu :

a. Faktor Penyebab Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah adanya komitmen yang kuat dari seluruh *stakeholder* untuk memfokuskan sumber daya dan dana dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam tahun 2023, juga tumbuhnya rasa percaya diri dan kemandirian bagi kelompok tani ikan dan nelayan.

b. Faktor Penyebab Kegagalan Pencapaian Sasaran

Berdasarkan hasil pencapaian sasaran dari level sub kegiatan, kegiatan sampai program, maka di tahun 2023 ini tidak ada yang dianggap gagal, hanya saja ada yang pencapaiannya di bawah 80 persen. Ini disebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan dengan seluruh *stakeholder* unit-unit yang terlibat dalam proses pencapaian kinerja dan pengambil keputusan dalam proses-proses perencanaan dan penganggaran yang kurang tepat.

c. Hambatan/Masalah yang dihadapi Dalam Pencapaian Sasaran

- 1) Keterbatasan modal dan masih rendahnya pendapatan masyarakat nelayan sehingga tidak mampu melakukan penambahan dan perbaikan kapal;
- 2) Restrukturisasi pelaku nelayan yang tidak sejalan dengan kebutuhan akan produk perikanan, dengan alasan menjadi nelayan adalah profesi jalan terakhir atau tidak menjanjikan;
- 3) Pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan yang belum optimal; dan
- 4) Rendahnya mutu dan daya saing produk hasil perikanan.

d. Strategi/Alternatif Solusi yang dilakukan untuk Memecahkan Masalah

- 1) Restrukturisasi pelaku nelayan yang tidak sejalan dengan kebutuhan akan produk perikanan, dengan alternatif solusi dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan peningkatan keterampilan/kapasitas pelaku utama perikanan, pendampingan sertifikasi lahan nelayan, pembinaan desa pesisir dan pendampingan pada kelompok perikanan tangkap; dan
- 2) Melaksanakan pembinaan kelompok pemasaran hasil perikanan dan pelaksanaan kegiatan pameran dan ekspo produk perikanan.

Upaya pencapaian sasaran strategis **Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan** didukung oleh 3 (tiga) program yang dirincikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 :
Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan Tahun 2023

Sasaran	Program	Indikator Program	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	10.216 Ton	10.373 Ton	101,53 %
	Program Pengelolaan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	315.710 Ton	378.996,70 Ton	120,05%
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Hasil Pengolahan Ikan	322 Ton	564,46 Ton	175,29 %

Penghitungan nilai tambah sub kategori perikanan atau yang disebut juga dengan Produk Domestik regional Bruto (PDRB) Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, hanya didasarkan pada sektor primer yang mencakup perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Adapun pencapaian pembangunan sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERIKANAN TANGKAP

Produksi perikanan tangkap tahun 2023 sebesar 10.373 ton, meningkat 1,03% jika dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap tahun 2022 sebesar 10.267,5 ton. Produksi perikanan tangkap tahun 2023 sebesar 10.373 ton terdiri dari produksi perairan laut sebesar 10.126 ton dan produksi perairan danau sebesar 247 ton. Produksi perikanan tangkap di laut didominasi oleh 5 (lima) jenis ikan yakni Tongkol, Tembang, Layang, Teri dan Kembung.

PERIKANAN BUDIDAYA

Produksi perikanan budidaya tahun 2023 sebesar 378.996,70 ton, meningkat 18,83 % jika dibandingkan dengan produksi perikanan budidaya tahun 2022 sebesar 318.944,59 ton. Produksi perikanan budidaya tahun 2023 sebesar 378.996,70 ton, terdiri dari produksi perikanan budidaya laut sebesar 211.221,40 ton, produksi perikanan budidaya tambak sebesar 166.735,35 ton, dan produksi perikanan budidaya kolam sebesar 1.040 ton. Total produksi perikanan budidaya tahun 2023 didominasi oleh 5 (lima) komoditas perikanan budidaya diantaranya Rumput Laut (*Eucheuma cottoni*), Rumput Laut (*Gracilaria*) Bandeng (*Chanos chanos*), Lele (*Clariidae*), Udang (*Caridea*) dan Nila (*Oreochromis niloticus*).

Tabel 3.6 :
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja Tahun 2023	% Penyerapan Anggaran Tahun 2023	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	99 %	96,73 %	2,27 %
	Produksi Perikanan	119,47 %	96,73 %	22,74 %

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pencapaian sasaran strategis dengan pencapaian realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut. Dari tabel di atas, pencapaian sasaran strategis Produktivitas Sektor Perikanan untuk indikator Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dengan

persentase capaian kinerja sebesar 99 % dan persentase penyerapan anggaran sebesar 96,73 % telah mengefisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,27 %. Sedangkan indikator Produksi Perikanan dengan persentase capaian kinerja sebesar 119,47 % dan persentase penyerapan anggaran sebesar 96,73 % telah mengefisiensi penggunaan sumber daya sebesar 22,74 %.

2. SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Tabel 3.7 :
Capaian Nilai Lakip Tahun 2023

Sasaran Strategis 2			Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah			
Indikator Kinerja			Nilai Lakip			
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Restra
			Target	Realisasi	% Capaian	
65,75	71,39	75,95	71	75,95	106,97	81

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Tim Penilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, Dinas Perikanan mendapatkan nilai **75,95**. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, maka angkanya sama dengan tahun 2023 karena sampai saat ini Tim Penilai AKIP masih dalam tahap penilaian. Pada tabel di atas, digambarkan capaian kinerja Nilai Lakip menunjukkan peningkatan. Ini dipicu oleh adanya kerjasama antar

stakeholder di lingkup Dinas Perikanan yang berkomitmen untuk memperbaiki kinerja mereka.

Capaian kinerja Nilai Lakip selama (empat) tahun terakhir digambarkan pada diagram dibawah ini:

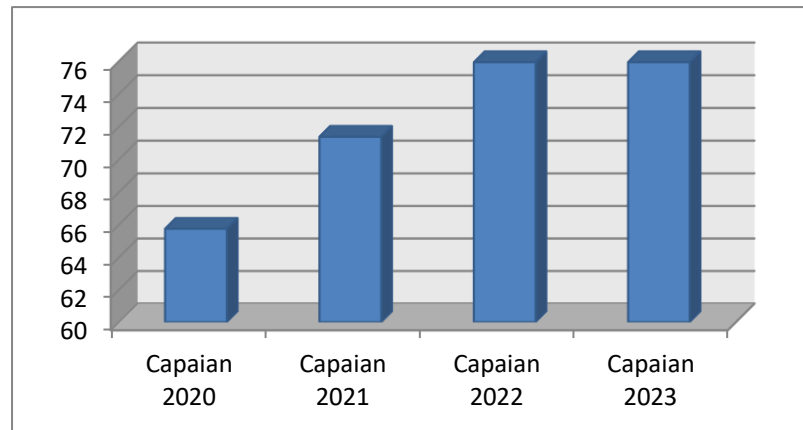


Diagram 3.3 :
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Lakip Tahun 2020-2023

Perbandingan capaian kinerja Nilai Lakip tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam renstra berdasarkan target akhir jangka menengah, Nilai Lakip yang harus dicapai yaitu 81 sedangkan realisasi sampai tahun 2023 sebesar 75,95. Artinya masih ada nilai yang harus dicapai sebesar 5,05.

Adapun upaya strategis untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan antara lain penyesuaian sistem perencanaan; penganggaran dan informasi kinerja; sosialisasi, asistensi dan konsultasi pelaksanaan kebijakan akuntabilitas kinerja; partisipasi dan komitmen seluruh level pimpinan dalam penyusunan perencanaan dan monitoring kinerja serta penyusunan laporan kinerja; peningkatan budaya kinerja; pengelolaan APBD berbasis kinerja dan prioritas daerah; pengintegrasian system anggaran, kegiatan dan kinerja organisasi serta pegawai berbasis teknologi informasi.

Upaya pencapaian sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah** didukung oleh 1 (satu) program yang dirincikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8 :
Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Sasaran	Program	Indikator Program	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase penunjang urusan perangkat daerah yang berjalan sesuai standar	100 %	101,93 %	101,93 %

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pencapaian sasaran strategis dengan pencapaian realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut. Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan persentase capaian kinerja sebesar 101,93 % dan persentase penyerapan anggaran sebesar 96,73 % telah mengefisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,2 %. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9 :
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja Tahun 2023	% Penyerapan Anggaran Tahun 2023	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah	Nilai Lakip	101,93 %	96,73 %	5,2 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan Urusan Perikanan di Kabupaten Luwu Timur diarahkan untuk peningkatan usaha perikanan dan menumbuhkan sikap kemandirian petani ikan dalam upaya peningkatan produksi guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi yang berorientasi pada pola agroindustri yang berbasis Sumber daya lokal dan pasar global. Selain itu, pelaksanaan urusan Perikanan dan implementasi dari Visi Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 – 2026 yaitu **“Luwu Timur Yang Berkelanjutan Dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama Dan Budaya”**.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Permendagri 86 Tahun 2017. Analisis kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja menggunakan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan sasaran target yang ada dalam Renstra Tahun 2021-2026. Untuk lebih jelasnya lihat pada **tabel** sebagai berikut :

Tabel. 3.10 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan
Kabupaten Luwu Timur

No.	INDIKATOR	SPM/ Stan dar Nasio nal	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN					PROYE KSI	CATAT AN ANALI SIS
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Produksi perikanan		Jumlah Produksi Ikan (Ton) dibagi Target Daerah (Ton) x 100%	100	100	100	100		100	101,6	119,4				
2	Konsumsi ikan		Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) dibagi Target Daerah (Kg) x 100%	100	100	100	100		100	100	100				
3	Cakupan bina kelompok nelayan		Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n dibagi Jumlah kelompok nelayan x100%	12	13	14	15		16,79	26,68	29,41				
4	Produksi perikanan kelompok nelayan		Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan dibagi Jumlah produksi ikan di daerah x 100%	42	42	42	42		3,11	3,11	3,75				
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman		Jumlah tangkapan ikan dibagi 80% dari tangkapan maksimum lestari x 100%	1,26	1,27	1,28	1,29		83,33	85,24	86,12				
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial		Kawasan lindung perairan Total luas perairan teritorial	0,23	0,23	0,23	0,23		0,001	0,001	0,001				
7	Nilai tukar nelayan		Indeks yang diterima nelayan dibagi Indeks yang dibayar nelayan x 100	105,15	106,01	106,87	107,73		103,86	103,92	103,93				

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD dilakukan guna melihat kondisi semua aspek yang terkait dengan eksistensi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur beserta perkembangannya beberapa tahun ini terutama menyangkut pelayanan publik (*public service*) serta tanggung jawab (akuntabilitas) dalam upaya mewujudkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Identifikasi ini berguna untuk melihat sampai dimana posisi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur saat ini dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang untuk mempertahankan keberhasilan dan mengeliminir kegagalan.

Rancangan RPJMD 2021-2026 yang merupakan perwujudan dokumen resmi dari rencana kerja pencapaian visi misi Bupati terpilih tahun 2021-2025 menjadi bahan pertimbangan prioritas dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang direncanakan. Beberapa isu strategis yang melingkupi pelaksanaan pelayanan di sektor Perikanan tergambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.11
Isu Strategis Yang Melingkupi Pelaksanaan Pelayanan di Sektor Perikanan
Isu Permasalahan dalam pelaksanaan TUPOKSI

	Lingkungan Hidup	Sosial- Budaya	Ekonomi	Kelembagaan
1	Penurunan Stok Ikan	Kesenjangan Gender / akses perempuan masih rendah untuk ikut berpartisipasi	Rendahnya Produktivitas dan daya saing usaha Perikanan	
2	Pemanfaatan Tata Ruang Laut dan Pesisir (Sinergitas Perencanaan yang lemah)	Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah	Keterbatasan sarana dan prasarana produksi perikanan (balai benih unggul dan kebun bibit rumput laut)	
3	Pemanfaatan Tata Ruang Laut dan Pesisir (Sinergitas Perencanaan yang lemah)	Teknologi dan infrastruktur untuk akses informasi masih kurang.	Inovasi teknologi usaha perikanan masih kurang.	
4	Masih maraknya IUU Fishing di wil pesisir & perairan pedalaman	Pemahaman masyarakat tentang penanganan Mutu masih rendah	Pengelolaan pelabuhan perikanan belum optimal	

Isu Permasalahan dalam pelaksanaan TUPOKSI				
	Lingkungan Hidup	Sosial- Budaya	Ekonomi	Kelembagaan
5	Hama dan penyakit udang/ikan/Rumput Laut	Kualitas SDM dan kelembagaan masih lemah.	Sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan masih terbatas	
6	Degradasi dan kerusakan lingkungan		Struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil	

Berdasarkan hasil indentifikasi permasalahan periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan telaahan terhadap visi misi Bupati Terpilih serta kaitannya dengan rencana pembangunan nasional (Renstra K/L), dan provinsi (Renstra Provinsi), tata ruang dan lingkungan serta pelaksanaan SDGs, maka isu-isu strategis yang menjadi fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan infastruktur/sarana prasarana dari perikanan budidaya, tangkap dan pengolahan perikanan;
2. Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha perikanan;
3. Belum optimalnya fungsi kelembagaan petani pembudidaya dan nelayan perikanan; dan
4. Kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya.

Adapun kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan tugas pokok pemerintahan dan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan adalah faktor pendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang dimiliki dan merupakan kelebihan organisasi secara internal. Kekuatan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur antara lain adalah :

- a. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya;
- b. Tersedianya pedoman, prosedur dan tata laksana kerja yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan;

- c. Adanya Peraturan Daerah yang menjadi dasar pembentukan, tugas dan fungsi organisasi serta Peraturan Daerah lainnya yang menunjang kebijakan pengelolaan kegiatan perikanan;
- d. Adanya sumber daya aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;
- e. Inovasi kegiatan berupa pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian;
- f. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian ;
- g. Adanya koordinasi yang baik antar unit kerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur; dan
- h. Adanya iklim kerja yang kondusif di dalam lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan secara internal/bersifat ke dalam, adapun kelemahan yang dimiliki Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur antara lain adalah :

- a. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas;
- c. Belum adanya sistem pola karier yang jelas untuk dijadikan pedoman bagi pegawai melalui sistem karier berbasis kinerja;
- d. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang undangan;
- e. Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai baik manajerial, fungsional maupun teknis dengan keterbatasan anggaran;
- f. Kurangnya penguasaan pegawai di bidang teknologi informasi; dan

- g. Masih ditemukannya budaya kerja pegawai/Pegawai ASN yang bekerja menunggu perintah atasan dan tidak memahami tugas pokok dan fungsi.

3. Peluang (*Opportunity*)

- a. Adanya kebijakan pemerintah dalam upaya menciptakan sistem penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*);
- b. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar Pegawai ASN berdisiplin dan professional;
- c. Adanya komitmen untuk menegakkan disiplin aparatur pemerintah daerah yang ditunjang dengan adanya penerapan sanksi yang tegas serta makin kritisnya masyarakat dalam menangani masalah hukum kepegawaian terutama dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi untuk menciptakan *good governance*;
- d. Adanya dukungan kebijakan Pemerintah Daerah;
- e. Adanya hubungan harmonis antara atasan dan bawahan;
- f. Menguatnya tuntutan masyarakat terhadap aparatur pemerintah yang profesional dan berwawasan global; dan
- g. Tersedianya jaringan internet online di semua Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

4. Tantangan (*Threat*)

- a. Perubahan dan perkembangan teknologi dan permasalahan di masyarakat yang harus ditangani secara cepat dan tepat;
- b. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat;
- c. Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan sistem pelayanan masyarakat perikanan;
- d. Semakin terbukanya akses *stakeholder* guna mengevaluasi kinerja/ pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;

- e. Kurangnya tingkat partisipasi stakeholder di dalam pemenuhan persyaratan administrasi untuk pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur; dan
- f. Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan manajerial, teknis dan fungsional untuk meningkatkan kompetensi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Program dan kegiatan-kegiatan dalam rancangan awal RKPD Tahun 2025, tidak terlepas dari Rancangan RPJMD Tahun 2021-2026, yang memuat program dan kegiatan dalam upaya pencapaian visi misi Bupati. Pertimbangan dan analisis kebutuhan berdasarkan hasil musrenbang dengan mempertimbangkan anggaran yang dialokasikan pada Dinas Perikanan, maka beberapa kegiatan akhirnya dipadukan dan dioptimalkan dalam kegiatan yang berkaitan yang dijelaskan pada Tabel 3. (*terlampir*)

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan

Sinkronisasi program prioritas Dinas Perikanan yang telah ditetapkan melalui Rancangan RPJMD 2021-2026 dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui tahapan berikut :

1. Kebijakan umum setiap agenda pokok pembangunan dijabarkan oleh Tim perencanaan Daerah (Bapelitbanda) yang kemudian oleh Dinas Perikanan diperjelas dalam bentuk **program prioritas dengan indikator keluaran / sasaran dan pagu indikatif yang jelas**;
2. Program prioritas dan pagu indikatif dari masing-masing Bidang di Dinas Perikanan akan menjadi bahan diskusi dalam Musrenbang Kecamatan untuk menyusun rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten;
3. Hasil Musrenbang Kabupaten akan menjadi bahan dalam penyusunan RKPD Tahun berikutnya; dan
4. Pokok-pokok Pikiran DPRD juga menjadi bahan pertimbangan penyusunan RENJA Tahun 2025.

Permasalahan yang kadang terjadi dari tahun ke tahun yaitu proses sosialisasi perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan melalui RPJMD dilaksanakan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan MUSRENBANG dan berlangsung hanya sehari, sehingga waktu untuk melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara desa/kecamatan dan kabupaten/DPRD sebagai pemegang kendali kebijakan eksekutif/legislatif tidak bisa berjalan secara optimal. Mekanisme perencanaan melalui MUSRENBANG secara berjenjang yang bahkan dilengkapi dengan reses yang dilakukan oleh para legislator masih belum mampu mengakomodir keinginan atau kebutuhan masyarakat.

Kendala lain pengumpulan informasi pada musrenbang tingkat kabupaten yaitu usulan-usulan yang diajukan terlalu mikro dan lebih dominan pada pembangunan fisik. Disamping itu sering ditemui dari sekian banyak masyarakat yang diundang dalam sebuah forum yang berani mengutarakan pendapat hanya segelintir orang.

Telaahan terhadap usulan program yang diajukan oleh pemangku kepentingan melalui kegiatan Musrenbang 2024 dan Pokok-pokok pikiran DPRD, dapat dievaluasi bahwa beberapa kegiatan yang diusulkan pada umumnya bersifat permintaan bantuan langsung berupa sarana produksi perikanan budidaya maupun sarana produksi perikanan tangkap. Sesuai ketentuan Permendagri 32 Tahun 2010 yang ditindak lanjuti melalui Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring, Evaluasi Hibah dan bantuan sosial.

Sebagian besar usulan MUSRENBANG Tahun 2024 yang menjadi bahan perencanaan Tahun 2025 merupakan usulan dalam bentuk bantuan barang yang diserahkan ke masyarakat baik berupa sarana produksi maupun bantuan hibah pembangunan sarana fisik. Namun yang menjadi permasalahan, permintaan bantuan tersebut tidak dibarengi dengan usulan dalam bentuk proposal sehingga mekanisme administrasi perencanaan tidak optimal.

Tabel 3.12 (T- C 32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Perikanan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
1.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Desa Tabaroge, Pasi-Pasi, Watangpanua, Tampinna, dan Bahari	Jumlah jalan produksi Tambak yang dibangun (Km)	5 Paket	Memudahkan masyarakat petani tambak dalam mobilisasi hasil budidaya
		Desa Lauwo, Balantang, Balo-Balo, Burau, Lakawali Pantai, Maliwowo, Wewangriu, Tabaroge, Lakawali, dan Watangpanua	Jumlah Jembatan tambak yang disediakan (unit)	10 Unit	Memudahkan masyarakat petani tambak dalam mobilisasi hasil budidaya
2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Lauwo, Lakawali Pantai, Tampinna, Balo-Balo, Mabonta, Bawalipu, Lampenai, Bahari, Watangpanua, Cendana Hitam Timur, Masiku, Manunggal, Libukan Mandiri, Loeha, Cendana Hitam, Maramba, Patengko dan Rinjani	Jumlah benih unggul serta sarana pembudidayaan ikan yang tersedia (kelompok)	24 Paket	Kegiatan ini sangat di butuhkan masyarakat Petani tambak untuk meningkatkan hasil produksi budidaya
II	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				
1.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Desa Watangpanua, Maliwowo, Mabonta, dan Lakawali Pantai	Jumlah Pembangunan TPI dan tambatan perahu yang dibangun/rehap	4 Unit	Kegiatan ini sangat di butuhkan masyarakat untuk memudahkan dalam mobilisasi dan pemasaran hasil tangkapan
2.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Desa Tampinna, Balantang, Baruga, Pongkeru, Burau Pantai, Lakawali, Manurung, Bawalipu, Lampenai, dan Lakawali Pantai	Jumlah sarana alat tangkap dan alat bantu usaha perikanan ikan yang disediakan (kelompok)	14 paket	Kegiatan ini sangat di butuhkan masyarakat nelayan untuk memperbaiki alat tangkap sehingga meningkatkan hasil tangkapan

III.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan				
1.	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Desa Puncak Indah, Tokalimbo, Cendana Manurung, Watangpanua, Bahari, Matompi, Mandiri, Manunggal, Pertasi Lumbewe dan Balantang	Jumlah kelompok/pelaku usaha yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan skala mikro dan kecil (Kelompok)	16 Paket	Kegiatan ini sangat di butuhkan masyarakat pelaku usaha perikanan untuk memperbarui alat pengolahan hasil perikanan sehingga meningkatkan hasil produksi olahan hasil perikanan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan secara teknis mengacu pada **arah** kebijakan pembangunan Nasional dan arah kebijakan pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik daerah yaitu pada:

1. Prioritas Pembangunan Nasional sektor Kelautan, Perikanan

Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat empat *major project* terkait dengan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan yaitu :

- ☞ Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan;
- ☞ Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng;
- ☞ Integrasi Pelabuhan Perikanan; dan
- ☞ Pasar Ikan (*Fish Market*) Bertaraf Internasional.

2. Prioritas Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Provinsi

Prioritas Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:

- ☞ Peningkatan Produksi Perikanan;
- ☞ Peningkatan konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- ☞ Peningkatan Ekspor Hasil perikanan;
- ☞ Nilai tambah produk olahan;
- ☞ Pendapatan perkapita nelayan dan pembudidaya; dan
- ☞ Jumlah Tenaga Kerja.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Pelaksanaan perencanaan kerja Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Tahun Keempat dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Prioritas pembangunan difokuskan kepada pencapaian target kinerja

sebagaimana yang ditetapkan dengan berpedoman pada RPJMD dan Renstra OPD.

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang menggambarkan arah strategik organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memperhatikan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pembagian misi. Adapun tujuan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Produktivitas Sektor-Sektor Perekonomian
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Penjabaran tujuan selanjutnya dituangkan dalam bentuk sasaran. Sasaran adalah penjelasan dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, triwulan, semesteran dan bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik, dapat dinilai dan terukur, menantang namun dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran yang diharapkan dalam jangka pencapaian tujuan Renja Dinas Perikanan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

3.3. Program Dan Kegiatan

Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan selama periode 2021-2026, maka ditetapkan program dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang terkait erat dalam upaya pencapaian pembangunan Perikanan di Kabupaten Luwu Timur. Adapun Program dan Kegiatan Tahun 2025 akan dilaksanakan dalam 5 (lima) Program, 18 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan, terdiri dari :

1) Bidang Perikanan Tangkap

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan produksi terutama dari hasil tangkapan nelayan. Indikator Program ini ialah

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap. Untuk mencapai target program tersebut, maka dilakukan beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran kegiatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan.
 - 1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan, dengan sasaran sub kegiatan adalah tersedianya data dan informasi sumber daya ikan.
 - 1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, dengan sasaran sub kegiatan adalah tersedianya prasarana usaha perikanan tangkap.
 - 1.3 Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, dengan sasaran sub kegiatan adalah tersedianya sarana usaha perikanan tangkap.
- 2) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran kegiatan adalah pemberdayaan kelompok nelayan.
 - 2.1 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil, dengan sasaran kegiatan adalah nelayan purse seine yang dilatih.
 - 2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil, dengan sasaran sub kegiatan adalah pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil.
- 3) Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dengan sasaran kegiatan adalah pengelolaan tempat pelelangan ikan.
 - 3.1 Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dengan sasaran sub kegiatan adalah tersedianya pengelolaan tempat pelelangan ikan.

b. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini diarahkan untuk melakukan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan kegiatan dan Sub Kegiatan :

- 1) Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota, dengan sasaran kegiatan adalah menurunnya tingkat pelanggaran hukum terkait penangkapan ikan.

- 1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota, dengan sasaran sub kegiatan adalah menurunnya tingkat pelanggaran hukum terkait penangkapan ikan.

2) Bidang Perikanan Budidaya

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program tersebut diarahkan untuk peningkatan produksi dan produktivitas hasil Budidaya melalui Pengembangan Bibit Ikan Unggul di Balai Benih maupun Kelompok, serta pendampingan terhadap Kelompok Penerima Bantuan baik dari APBN Pusat, Propinsi maupun dari Pemda. Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya meliputi :

- 1) Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil, dengan sasaran kegiatan adalah pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan.
 - 1.1 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil, dengan sasaran sub kegiatan adalah peningkatan kapasitas pembudidaya ikan.
 - 1.2 Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dengan sasaran

sub kegiatan adalah peningkatan pengetahuan bagi pembudidaya ikan.

- 2) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, dengan sasaran kegiatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana pembudidaya ikan.

- 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran sub kegiatan adalah tersedianya data dan informasi pembudidayaan ikan.

- 2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran sub kegiatan adalah tersedianya prasarana pembudidayaan ikan.

- 2.3 Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran sub kegiatan adalah tersedianya sarana pembudidayaan ikan.

- 2.4 Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran sub kegiatan adalah menurunnya jumlah penyakit ikan.

- 2.5 Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat, dengan sasaran sub kegiatan adalah meningkatnya hasil pembudidaya ikan.

3) Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan

Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas produksi perikanan melalui pembinaan kelompok pengolahan ikan, pengelolaan pabrik rumput laut, pengelolaan pabrik es, pengelolaan gudang rumput laut dan peningkatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran ikan lainnya. Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan meliputi :

- 1) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, dengan sasaran kegiatan adalah terdapatnya usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil.
 - 1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran sub kegiatan adalah tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan.
- 2) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dengan sasaran kegiatan adalah meningkatnya mutu dan keamanan hasil perikanan.
 - 2.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dengan sasaran sub kegiatan adalah peningkatan pengetahuan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil.
- 3) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran kegiatan adalah tersedianya bahan baku industri pengolahan.
 - 3.1 Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran sub kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana pengolahan perikanan.

4) Kesekretariatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dengan sasaran program adalah meningkatnya rata-rata capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran. Indikator program yaitu persentase

rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran. Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka dilakukan kegiatan dan Sub Kegiatan :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu.
 - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan sasaran sub kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun.
 - 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan sasaran sub kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu.
 - 1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dengan sasaran sub kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu.
 - 1.4 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sasaran sub kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah.
 - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan sasaran sub kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya.

- 2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan sasaran sub kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu.
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator adalah persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang ditatausahakan.
- 3.1 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan sasaran sub kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator jumlah penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu.
- 4) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikatornya adalah persentase tingkat ketercapaian target pendapatan perangkat daerah.
- 4.1 Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah, dengan sasaran sub kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu.
- 5) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sasaran kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dan indikatornya adalah persentase kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah.
- 5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan sasaran sub kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan.

- 5.2 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan sasaran sub kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan.
 - 5.3 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan sasaran sub kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- 6) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah.
- 6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan sasaran sub kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan.
 - 6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan sasaran sub kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.
 - 6.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan sasaran sub kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator jumlah bahan logistik kantor yang disediakan.
 - 6.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan sasaran sub kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator jumlah barang bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.

- 6.5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan sasaran sub kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya.
- 6.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan sasaran sub kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan.
- 7) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sasaran sub kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dan indikatornya adalah persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang diadakan.
 - 7.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan sasaran sub kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan.
 - 7.2 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, dengan sasaran sub kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator jumlah mebel yang diadakan.
 - 7.3 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan sasaran sub kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan.
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dan indikatornya adalah persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan.
 - 8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan sasaran sub kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja

- perangkat daerah dan indikator jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan.
- 8.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan sasaran sub kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan.
- 8.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan sasaran sub kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan.
- 9) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dan indikatornya adalah persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan.
- 9.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan sasaran sub kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.
- 9.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, dengan sasaran sub kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator jumlah mebel yang di pelihara.
- 9.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan sasaran kegiatan adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.
- 9.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator jumlah

gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.

Untuk lebih jelasnya, Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan dapat dilihat pada Tabel 5. (*terlampir*).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2025 Dinas Perikanan direncanakan melaksanakan 5 (lima) Program, 18 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 22.820.307.700,-. Alokasi program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Tabel 6. (*terlampir*)

BAB V

PENUTUP

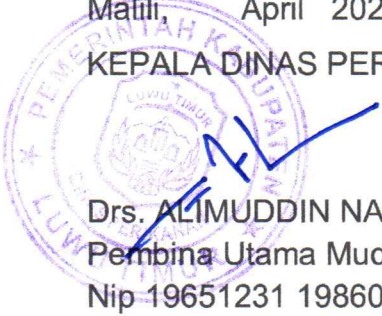
Rencana kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. Seluruh elemen pelaksana di Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas serta partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja ini. Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya maka pada Tahun Anggaran 2025, Renja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur akan melaksanakan sebanyak 5 (lima) Program yang akan diakselarasikan dengan visi misi Bupati terpilih serta RPJPD Kabupaten Luwu Timur.

Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu bidang dan lintas bidang dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada kondisi, regulasi serta ketersediaan anggaran pemerintah daerah tahun anggaran bersangkutan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang akan lebih baik.

Matili, April 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN



Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip 19651231 198603 1 134

**L
A
M
P
I
R
A
N**

TABEL. 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.	BELANJA LANGSUNG				22,820,307,700					24,946,407,700	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Diskan	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran (persen)	100	5,488,776,700	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Diskan	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran (persen)	100	5,488,776,700	
3.25.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu (dokumen)	100	108,232,250	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu (dokumen)	100	108,232,250	
3.25.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	38,668,500	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	38,668,500	
3.25.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Diskan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	2	4,728,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Diskan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	2	4,728,000	
3.25.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Diskan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	2	5,918,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Diskan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	2	5,918,000	
3.25.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	10	58,917,750	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	10	58,917,750	
3.25.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskan	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah (persen)	100	3,509,258,200	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskan	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah (persen)	100	3,509,258,200	
3.25.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)	26	3,436,715,700	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)	26	3,436,715,700	
3.25.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Diskan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	18	72,542,500	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Diskan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	18	72,542,500	
3.25.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Diskan	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang ditatausahakan (persen)	100	53,213,200	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Diskan	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang ditatausahakan (persen)	100	53,213,200	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.25.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Diskan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	4	53,213,200	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Diskan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	4	53,213,200	
3.25.01.2.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Diskan	Persentase tingkat ketercapaian target pendapatan perangkat daerah (persen)	100	15,150,500	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Diskan	Persentase tingkat ketercapaian target pendapatan perangkat daerah (persen)	100	15,150,500	
3.25.01.2.04.07	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Diskan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)	4	15,150,500	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Diskan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)	4	15,150,500	
3.25.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskan	Persentase kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (persen)	100	166,298,850	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskan	Persentase kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (persen)	100	166,298,850	
3.25.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Diskan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (paket)	30	51,950,000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Diskan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (paket)	30	51,950,000	
3.25.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Diskan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	12	28,490,850	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Diskan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	12	28,490,850	
3.25.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Diskan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	6	85,858,000	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Diskan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	6	85,858,000	
3.25.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskan	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (persen)	100	504,643,200	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskan	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (persen)	100	504,643,200	
3.25.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	10	6,864,000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	10	6,864,000	
3.25.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	5	36,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	5	36,000,000	
3.25.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	20	10,641,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	20	10,641,000	
3.25.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	4	10,070,000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	4	10,070,000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.25.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Diskan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	48	7,500,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Diskan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	48	7,500,000	
3.25.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu (Makan Minum Tamu)	Diskan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)	12	13,220,000	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu (Makan Minum Tamu)	Diskan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)	12	13,220,000	
3.25.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	420,348,200	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	420,348,200	
3.25.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskan	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang diadakan (persen)	100	705,000,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskan	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang diadakan (persen)	100	705,000,000	
3.25.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	4	140,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	4	140,000,000	
3.25.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Diskan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (paket)	2	65,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Diskan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (paket)	2	65,000,000	
3.25.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1	500,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1	500,000,000	
3.25.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskan	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan (persen)	100	278,027,500	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskan	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan (persen)	100	278,027,500	
3.25.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12	9,827,500	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12	9,827,500	
3.25.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	84,600,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	84,600,000	
3.25.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	183,600,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	183,600,000	
3.25.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskan	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan (persen)	100	148,953,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskan	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan (persen)	100	148,953,000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.25.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	23	97,050,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	23	97,050,000	
3.25.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	40	23,300,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	40	23,300,000	
3.25.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Diskan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	5	28,603,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Diskan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	5	28,603,000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Diskan	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	10,165.90	5,540,894,600	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Diskan	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	10,165.90	6,144,894,600	
3.25.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Diskan	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap (Persen)	100	3,481,948,300	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Diskan	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap (Persen)	100	4,085,948,300	
3.25.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Diskan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia (dokumen)	4	85,948,300	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Diskan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia (dokumen)	4	85,948,300	
3.25.03.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Diskan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (unit)	2	540,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Diskan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (unit)	2	1,000,000,000	
3.25.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Diskan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	50	2,856,000,000	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Diskan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	50	3,000,000,000	
3.25.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil	Diskan	Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan (Persen)	100	168,946,300	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil	Diskan	Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan (Persen)	100	168,946,300	
3.25.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Diskan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	20	45,822,300	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Diskan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	20	45,822,300	
3.25.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Diskan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (kelompok)	12	123,124,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Diskan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (kelompok)	12	123,124,000	
3.25.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Kecamatan	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar (persen)	71	1,890,000,000	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Kecamatan	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar (Persen)	71	1,890,000,000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.25.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelegaraan Tempat Pelelangan Ikan	Kecamatan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (layanan)	3	1,890,000,000	Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelegaraan Tempat Pelelangan Ikan	Kecamatan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (layanan)	3	1,890,000,000	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kecamatan	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	315,565	7,362,425,200	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kecamatan	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	315,565	8,884,525,200	
3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdayan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kecamatan	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses iptek dan informasi dan penguatan kelembagaan (persen)	100	326,226,200	Kegiatan Pemberdayan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kecamatan	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses iptek dan informasi dan penguatan kelembagaan (Persen)	100	326,226,200	
3.25.04.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudaya Ikan Kecil	Kecamatan	Jumlah kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok)	10	58,448,200	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudaya Ikan Kecil	Kecamatan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok)	10	58,448,200	
3.25.04.2.02.04	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.	Kecamatan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	30	267,778,000	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.	Kecamatan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	30	267,778,000	
3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kecamatan	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan (Persen)	100	7,036,199,000	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kecamatan	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan (Persen)	100	8,558,299,000	
3.25.04.2.04.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	Kecamatan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	4	84,236,000	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	Kecamatan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	4	84,236,000	
3.25.04.2.04.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan	Kecamatan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	4	4,019,700,000	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan	Kecamatan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	4	5,000,000,000	
3.25.04.2.04.03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	21	2,458,200,000	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	21	3,000,000,000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.25.04.2.04.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (dokumen)	4	218,685,000	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (dokumen)	4	218,685,000	
3.25.04.2.04.06	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kecamatan	Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (usulan)	1	255,378,000	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kecamatan	Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (usulan)	1	255,378,000	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kecamatan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku (persen)	94	113,851,500	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kecamatan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku (persen)	94	113,851,500	
3.25.05.2.01	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Kecamatan	Cakupan masyarakat/ kelompok masyarakat pengawas yang aktif (Persen)	100	113,851,500	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Kecamatan	Cakupan masyarakat/ kelompok masyarakat pengawas yang aktif (Persen)	100	113,851,500	
3.25.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tagkap Di Wilayah Sungai Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Diskan	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (pelaku usaha)	24	113,851,500	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tagkap Di Wilayah Sungai Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Diskan	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (pelaku usaha)	24	113,851,500	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kecamatan	Jumlah produksi hasil pengolahan ikan (ton)	322	4,314,359,700	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kecamatan	Jumlah produksi hasil pengolahan ikan (ton)	322	4,314,359,700	
3.25.06.2.01	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kecamatan	Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP) (Persen)	100	385,984,600	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kecamatan	Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP) (Persen)	100	385,984,600	
3.25.06.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Kecamatan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (dokumen)	4	385,984,600	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Kecamatan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (dokumen)	4	385,984,600	
3.25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Diskan	Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya (Persen)	83	236,861,100	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Diskan	Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya (Persen)	83	236,861,100	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.25.06.2.02.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kecamatan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (unit usaha)	6	236,861,100	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kecamatan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (unit usaha)	6	236,861,100	
3.25.06.2.03	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan	Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang (persen)	64	3,691,514,000	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan	Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang (Persen)	64	3,691,514,000	
3.25.06.2.03.02	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Kecamatan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (pelaku usaha)	3	3,691,514,000	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Kecamatan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (pelaku usaha)	3	4,000,000,000	

Malili, April 2024

Kepala Dinas Perikanan

Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19651231 198603 1 134

TABEL. 5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN TAHUN 2025
KABUPATEN LUWU TIMUR

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.	BELANJA LANGSUNG				22,820,307,700			22,657,782,000
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran (persen)	Diskan	100	5,488,776,700		100	5,076,600,000
3.25.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pengangan, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu (dokumen)	Diskan	100	108,232,250		100	111,000,000
3.25.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	Diskan	2	38,668,500		2	40,000,000
3.25.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (dokumen)	Diskan	2	4,728,000		2	5,000,000
3.25.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (dokumen)	Diskan	2	5,918,000		2	6,000,000
3.25.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	Diskan	10	58,917,750		10	60,000,000
3.25.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah (persen)	Diskan	100	3,509,258,200		100	3,575,000,000
3.25.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)	Diskan	26	3,436,715,700		26	3,500,000,000
3.25.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	Diskan	18	72,542,500		18	75,000,000
3.25.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang ditatausahakan (persen)	Diskan	100	53,213,200		100	55,000,000
3.25.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	Diskan	4	53,213,200		4	55,000,000
3.25.01.2.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketercapaian target pendapatan perangkat daerah (persen)	Diskan	100	15,150,500		100	17,000,000
3.25.01.2.04.07	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)	Diskan	4	15,150,500		4	17,000,000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.25.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (persen)	Diskan	100	166,298,850		100	120,000,000
3.25.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	Diskan	30	51,950,000		-	-
3.25.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	Diskan	12	28,490,850		12	30,000,000
3.25.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	Diskan	6	85,858,000		6	90,000,000
3.25.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (persen)	Diskan	100	504,643,200		100	550,000,000
3.25.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Diskan	10	6,864,000		10	7,000,000
3.25.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	Diskan	5	36,000,000		5	40,000,000
3.25.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	Diskan	20	10,641,000		20	15,000,000
3.25.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Diskan	4	10,070,000		4	15,000,000
3.25.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	Diskan	48	7,500,000		48	8,000,000
3.25.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu (Makan Minum Tamu)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)	Diskan	12	13,220,000		12	15,000,000
3.25.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Diskan	12	420,348,200		12	450,000,000
3.25.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang diadakan (persen)	Diskan	100	705,000,000		100	205,000,000
3.25.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	Diskan	4	140,000,000		4	140,000,000
3.25.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (paket)	Diskan	2	65,000,000		2	65,000,000
3.25.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	Diskan	1	500,000,000		-	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.25.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan (persen)	Diskan	100	278,027,500		100	283,600,000
3.25.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	Diskan	12	9,827,500		12	10,000,000
3.25.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Diskan	12	84,600,000		12	90,000,000
3.25.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	Diskan	12	183,600,000		12	183,600,000
3.25.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan (persen)	Diskan	100	148,953,000		100	160,000,000
3.25.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Diskan	23	97,050,000		23	100,000,000
3.25.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	Diskan	40	23,300,000		40	30,000,000
3.25.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Diskan	5	28,603,000		5	30,000,000
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Diskan	10,165.90	5,540,894,600		10,166	5,721,822,300
3.25.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap (Persen)	Diskan	100	3,481,948,300		100	3,546,000,000
3.25.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (dokumen)	Diskan	4	85,948,300		4	90,000,000
3.25.03.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (unit)	Diskan	2	540,000,000		2	600,000,000
3.25.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (unit)	Diskan	50	2,856,000,000		50	2,856,000,000
3.25.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil	Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan (Persen)	Diskan	100	168,946,300		100.00	175,822,300

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.25.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	Diskan	20	45,822,300		20	45,822,300
3.25.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (kelompok)	Diskan	12	123,124,000		12	130,000,000
3.25.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar (Persen)	Kecamatan	71	1,890,000,000		71	2,000,000,000
3.25.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (layanan)	Kecamatan	3	1,890,000,000		3	2,000,000,000
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Kecamatan	315,565	7,362,425,200		315,565	7,425,000,000
3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdayan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses iptek dan informasi dan penguatan kelembagaan (Persen))	Kecamatan	100	326,226,200		100	360,000,000
3.25.04.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok)	Kecamatan	10	58,448,200		10	60,000,000
3.25.04.2.02.04	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	Kecamatan	30	267,778,000		30	300,000,000
3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan (Persen)	Kecamatan	100	7,036,199,000		100	7,065,000,000
3.25.04.2.04.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (dokumen)	Kecamatan	4	84,236,000		4	85,000,000
3.25.04.2.04.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	Kecamatan	4	4,019,700,000		4	4,000,000,000
3.25.04.2.04.03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	Kecamatan	21	2,458,200,000		21	2,500,000,000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.25.04.2.04.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (dokumen)	Kecamatan	4	218,685,000		4	220,000,000
3.25.04.2.04.06	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (usulan)	Kecamatan	1	255,378,000		1	260,000,000
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku (persen)	Kecamatan	94	113,851,500		94	120,000,000
3.25.05.2.01	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Cakupan masyarakat/ kelompok masyarakat pengawas yang aktif (Persen)	Kecamatan	100	113,851,500		100	120,000,000
3.25.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tagkap Di Wilayah Sungai Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (pelaku usaha)	Diskan	24	113,851,500		24	120,000,000
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi hasil pengolahan ikan (ton)	Kecamatan	322	4,314,359,700		322	4,314,359,700
3.25.06.2.01	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP) (Persen)	Kecamatan	100	385,984,600		100	385,984,600
3.25.06.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (dokumen)	Kecamatan	4	385,984,600		4	400,000,000
3.25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya (Persen)	Diskan	83	236,861,100		83	236,861,100
3.25.06.2.02.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (unit usaha)	Kecamatan	6	236,861,100		6	240,000,000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.25.06.2.03	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang (Persen)	Kecamatan	64	3,691,514,000		64	3,691,514,000
3.25.06.2.03.02	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (pelaku usaha)	Kecamatan	3	3,691,514,000		3	4,000,000,000

Malili, April 2024

Kepala Dinas Perikanan



Drs. AL MUDDIN NASIR, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
MP 19651231 198603 1 134

TABEL. 6
ALAKOSI ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PERIKANAN

KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2025		
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
5.2.	BELANJA LANGSUNG			22,820,307,700	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran (persen)	100	5,488,776,700	
3.25.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu (Persen)	100	108,232,250	
3.25.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	38,668,500	DAU
3.25.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	2	4,728,000	DAU
3.25.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	2	5,918,000	DAU
3.25.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	10	58,917,750	DAU
3.25.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah (persen)	100	3,509,258,200	
3.25.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)	26	3,436,715,700	DAU

KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2025		
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
3.25.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)	18	72,542,500	DAU
3.25.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang ditatausahakan (persen)	100	53,213,200	
3.25.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	4	53,213,200	DAU
3.25.01.2.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketercapaian target pendapatan perangkat daerah (persen)	100	15,150,500	
3.25.01.2.04.07	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)	4	15,150,500	DAU
3.25.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (persen)	100	166,298,850	
3.25.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	30	51,950,000	DAU
3.25.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	12	28,490,850	DAU
3.25.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	6	85,858,000	DAU
3.25.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (persen)	100	504,643,200	

KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2025		
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
3.25.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	10	6,864,000	DAU
3.25.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	5	36,000,000	DAU
3.25.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	20	10,641,000	DAU
3.25.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	4	10,070,000	DAU
3.25.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	48	7,500,000	DAU
3.25.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu (Makan Minum Tamu)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)	12	13,220,000	DAU
3.25.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	420,348,200	DAU
3.25.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang diadakan (persen)	100	705,000,000	
3.25.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	4	140,000,000	DAU
3.25.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (paket)	2	65,000,000	DAU
3.25.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1	500,000,000	DAU

KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2025		
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
3.25.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan (persen)	100	278,027,500	
3.25.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12	9,827,500	DAU
3.25.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	84,600,000	DAU
3.25.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	183,600,000	DAU
3.25.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan (persen)	100	148,953,000	
3.25.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	23	97,050,000	DAU
3.25.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	40	23,300,000	DAU
3.25.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	5	28,603,000	DAU
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	10,165.90	5,540,894,600	
3.25.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap (Persen)	100	3,481,948,300	

KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2025		
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
3.25.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia (dokumen)	4	85,948,300	DAU
3.25.03.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (unit)	2	540,000,000	DAU
3.25.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (unit)	50	2,856,000,000	DAU
3.25.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil	Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan (Persen)	100	168,946,300	
3.25.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	20	45,822,300	DAU
3.25.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (kelompok)	12	123,124,000	DAU
3.25.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar (Persen)	71	1,890,000,000	
3.25.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (layanan)	3	1,890,000,000	DAU
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	315,565	7,362,425,200	

KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2025		
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses iptek dan informasi dan penguatan kelembagaan (Persen)	100	326,226,200	
3.25.04.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok)	10	58,448,200	
3.25.04.2.02.04	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	30	267,778,000	DAU
3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan (Persen)	100	7,036,199,000	
3.25.04.2.04.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	4	84,236,000	DAU
3.25.04.2.04.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	4	4,019,700,000	DAU
3.25.04.2.04.03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	21	2,458,200,000	DAU

KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2025		
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
3.25.04.2.04.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (dokumen)	4	218,685,000	DAU
3.25.04.2.04.06	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidaya Ikan di Darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (usulan)	1	255,378,000	DAU
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku (persen)	94	113,851,500	
3.25.05.2.01	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Cakupan masyarakat/ kelompok masyarakat pengawas yang aktif (Persen)	100	113,851,500	
3.25.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tagkap Di Wilayah Sungai Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (pelaku usaha)	24	113,851,500	DAU
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi hasil pengolahan ikan (ton)	322	4,314,359,700	
3.25.06.2.01	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP) (Persen)	100	385,984,600	
3.25.06.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (dokumen)	4	385,984,600	DAU

KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2025		
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
3.25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya (Persen)	83	236,861,100	
3.25.06.2.02.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (unit usaha)	6	236,861,100	DAU
3.25.06.2.03	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang (Persen)	64	3,691,514,000	
3.25.06.2.03.02	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (pelaku usaha)	3	3,691,514,000	DAU